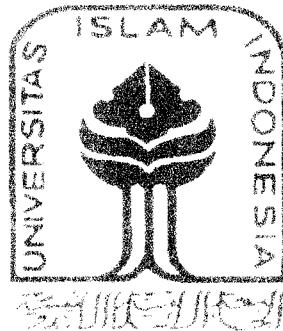


PERSPEKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT  
DAN TRANSPARANSI KELEBIHAN PUBLIK  
DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



SKRIPSI

Oleh

Nama

Furqan

Nomer Mahasiswa

140112002

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA

2006

**PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT  
DAN TRANSPARANSI KEBIDAKYAN PUBLIK  
DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata I jurusan Akuntansi  
pada Fakultas Ekonomi UH

Oleh

Nama : Ferga A.

Nomor Mahasiswa : 00312222

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2006

PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURABAYA  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT  
DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK  
DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Hasil Penelitian

diupikan oleh

Nama	Jagat
Nomor Mahasiswa	09312222
Jurusan	Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal April 2015

Dosen Pembimbing

(Andi Rahmatu Sidiq, M.C.A.)

# BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

## SKRIPSI BERJUDUL

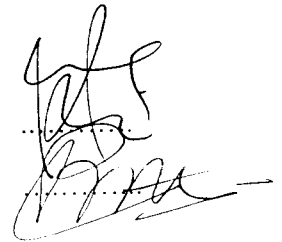
**Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Disusun Oleh: JAGAT  
Nomor mahasiswa: 00312222

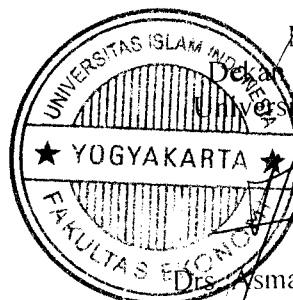
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 15 Mei 2006

Pembimbing Skripsi/Penguji : Arief Rahman, SE, M.Com

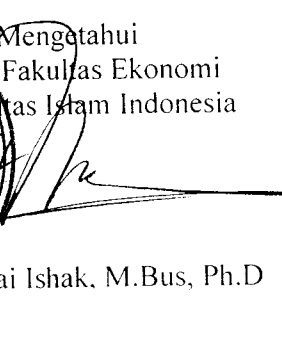
Penguji : Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si, Ak



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D



## Halaman Persembahkan

Dengan kerendahan hati  
sampaikan penulis persembahkan untuk :

- *Mamah Tercinta Hj. Yanti Damayanti, yang telah melahirkun, merawat,  
memberi kasih sayang, doa dan perhatian sepanjang hidup*

*"I Love U so Much Mamah"*

- *Bapak Terseayang "Kamundan" M. Anan Suberkun, S.sos, M.Si  
yang telah mendidik dan menjadikan diriku seperti sekarang ini.*

*"Hator Nubun Pisan Pap for Everyt" "U do"*

- *Adik-adikka Sugara, Mega dan Bintang  
yang telah menjadi teman dan adik yang baik.*

*"Terima Kasih atas Senyum dan Dukungan kalian Adik-adikku Sayang"*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Subhanallah segala puji bagi Allah pencipta semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah puji syukur hanya kepada Allah atas terselesainya skripsi ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kebenaran sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam.

Banyak hambatan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah Allah memberikan banyak sekali kemudahan sehingga hambatan yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Hanya atas izin Allah skripsi ini dapat diselesaikan untuk menjadi swastika memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan berpikir penulis dan menjawab pertanyaan penulis mengenai akuntansi sektor publik yang sangat diminati dan digeluti oleh penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak bisa tersusun dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak, Mamah, dan Adik-adikku terima yang senantiasa berdoa dan memberikan teguran, dorongan, motivasi dan semangat pada penulis.
2. Bapak Arief Rahman yang telah membimbing penulis menyusun skripsi ini, terima kasih atas diskusi, saran serta nasihat yang telah diberikan kepada penulis.

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Awal	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Berita Acara Ujian	iv
Halaman Persembahan	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Label	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstraksi	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5

BAB II. KAJIAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Partisipasi	6
2.2. Pengertian Transparansi Kebijakan Publik	8
2.3. Pengertian Anggaran	9
2.4. Fungsi dan Manfaat Anggaran	11
2.5. Pengertian Keuangan Daerah ( APBD )	14
2.6. Norma dan Prinsip - prinsip Anggaran Berbasis Kinerja	16
2.7. Pendekatan Dalam Proses Anggaran	19
2.7.1. <i>Top Down Approach</i>	19
2.7.1. <i>Bottom-Up Approach</i>	19
2.7.2. <i>Alisance Approach</i>	20
2.8. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	21
2.8.1. Landasan Hukum Penyusunan APBD	21
2.8.2. Proses Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Serang	22
2.9. Penelitian Terdahulu	26
BAB III. METODE PENELITIAN	27
3.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Serang	27
3.2. Variabel Penelitian	32
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian	32
3.4. Metode Pengumpulan Data	34
3.4.1. Jenis Data	34
3.4.2. Alat Pengumpul Data	35



3.4.2.1. Kuesioner Daftar Pertanyaan	35
3.4.2.2. Skala Likert	35
3.4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas	40
3.5. Metode Analisis Data	49
<b>BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	<b>41</b>
4.1. Analisis Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden	41
4.1.1. Analisis Variabel Partisipasi Masyarakat	41
4.1.2. Analisa Variabel Transparansi kebijakan Publik	47
4.2. Pembahasan	51
4.2.1. Pembahasan Variabel Partisipasi Masyarakat	51
4.2.2. Pembahasan Variabel Transparansi Kebijakan Publik	52
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>53</b>
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54
5.2.1. Saran Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang	55
5.2.2. Saran Untuk Penelitian Berikutnya	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
3.1. Daftar Kecamatan dan Limas Wilayah di Kabupaten Serang	28
3.2. Ringkasan APBD Kabupaten Serang Tahun 2004	31
3.3. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat	38
3.4. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik	38
3.5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat	39
3.6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	114
2.1. Proses perencanaan dan pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik	18
2.2. Alir Perencanaan Program menurut UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran menurut UU Keuangan Negara	24
2.3. Penyusunan dan Penetapan PERDA APBD Menurut Kepmendagri No 29 Tahun 2002	25

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	110
1. Uji Validitas Variabel Transparansi Kebnakaan Publik	50
2. Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebnakaan Publik	50
3. Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat	60
4. Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat	60
5. Frequency Table Partisipasi Masyarakat	64
6. Frequency Table Transparansi Kebnakaan Publik	62
7. Frequency Table	64
8. Relapitulasi Kuesioner	65
9. Kuesioner Partisipasi Masyarakat	67
10. Kuesioner Transparansi Kebnakaan Publik	68

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Populasi penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Serang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah panitia anggaran eksekutif (PAE).

Kuisioner digunakan sebagai data primer dengan menggunakan skala likert dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah **baik**.

Kata kunci: Persepsi, Partisipasi masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, APBD, Panitia Anggaran Eksekutif

## BAB I PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kepercayaan yang dipertanyakan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan Otonomi daerah. Berdasarkan ketetapan MPR nomor XV MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan khususnya pemerintah daerah perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggungjawab. Jika pada masa sebelumnya otonomi daerah hanya dijadikan jargon politik belaka akan tetapi dalam situasi ini dituntut keseriusannya baik secara ketertarikan

sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Oleh karena itu pemerintah daerah diminta untuk melakukan reformasi kelembagaan di lingkungan mereka (*institutional reform*).

Di bidang sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah, implikasi kedua undang-undang tersebut adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*), sistem pembiayaan (*financing reform*), sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (*audit reform*), serta sistem manajemen keuangan daerah.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (*public money*) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam upaya otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari *stake holder* Pemerintahan Daerah.

*World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai *"the way state power is used in managing economic and social resources for development of society"* sedangkan *United Nations Development Program (UNDP)* mendefinisikan *governance* sebagai *"the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels"*. Dalam hal ini

*World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *UNDP* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada *World Bank* dan *UNDP*, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*.

Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah.

Selubungan dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah".



## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penentuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?
2. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebiakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut diatas.

1. Untuk mengetahui Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD
2. Untuk mengetahui Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebiakan publik dalam penyusunan APBD

## 1.4. Manfaat Penelitian

Bagi penulis sebagai prasyarat untuk menyetesikan tugas akhir dalam menempuh pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi serta untuk mengabdikan ilmu pengetahuan dan mendalam minat dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik (ASPK) yang telah didapatkan selama kuliah

Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademis sektor publik (ASPI) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik.

Sementara bagi pemerintah daerah kabupaten Serang diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan ekonomi daerah dan usaha akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik (*Good Governance*).

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penyusunan skripsi, penulis akan menyajikan sistematika penulisan mulai dari latar belakang hingga kesimpulan yang akan dituliskan oleh penulis.

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi Pengertian partisipasi, pengertian transparansi, pengertian keuangan daerah (APBD) dan strategi terkait dengan penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Populasi dan sampel penelitian, Sumber dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Hasil analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan alat analisis yang digunakan.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan atas hasil pembahasan dan Saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance*, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu dimana para *stakeholder* sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka (World Bank 1996). Partisipan bukan merupakan aktor tunggal. Pemerintah Pusat, Menteri, DPR, Pemerintah Daerah, DPRD, LSM, Organisasi-organisasi publik, pihak-pihak swasta serta warga negara merupakan bagian dari partisipan (Brinkerhoff, 2002).

Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, antara lain melalui wakil-wakil rakyat yang ada di dewan (DPRD). Melalui wakil-wakil rakyat aspirasi masyarakat disampaikan kepada pemerintah daerah. Selain hal tersebut didalam masa reses anggota dewan melakukan proses *hearing* dengan masyarakat secara langsung yang disebut dengan Jaring Asmara (Penyaringan Aspirasi Masyarakat) hasilnya kemudian dirumuskan dan disebut dengan Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang digunakan sebagai salah satu acuan didalam proses penentuan APBD. Pemerintah daerah pun memiliki Kotak Pos Pengiriman Masyarakat yang dirangai oleh bagian Humas Pemuda yang menerima pengaduan, keluhan ataupun usulan dalam bentuk surat tertulis secara langsung dari masyarakat. Masyarakat pun dapat secara langsung menyampaikan aspirasi kepada Kepala Daerah didalam kegiatan kunjungan rumah yang berlangsung tiap

satu minggu sekali. Kepala Daerah juga membuka pengaduan keluhan ataupun usulan melalui Layanan Pesan Singkat SMS (*Short Message Service*). Kemudian masyarakat pun dapat melakukan unjuk rasa/demonstrasi sebagai salah satu cara dalam menyampaikan aspirasi.

## **2.2. Pengertian Transparansi Kebijakan Publik**

Transparansi atau keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Secara jelas terakomodasikan pada undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme. UU nomor 22 Tahun 1999 misalnya mengatur hal keterbukaan pertanggungjawaban ini pada pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1. Bahkan dalam UU nomor 28 Tahun 1999 ditegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai pemerintahan yang tentunya termasuk tentang keuangan. Informasi dimaksud mestinya dihasilkan dari suatu sistem akuntansi yang sesuai.

Menurut Marsasmo (2003) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban (Kepala Daerah) yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

### 2.3. Pengertian Anggaran

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Arah Kebijakan umum APBD disusun setelah melalui proses penjurangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurut Glenn A. Welch (1985) menyebutkan bahwa anggaran adalah suatu bentuk *statement* daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk *time plan* dalam periode tersebut.

Sedangkan menurut Jones dan Pendlebury (1976), bahwa anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sarana pengelompokan dana yang akan datang, sumber pengembangan ukuran ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan berbagai unit kerja.

Serta menurut M. Marsoto (1998) memberikan defnisi bahwa Anggaran adalah suatu rencana pemerintah yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Dari berbagai defnisi tersebut diatas dapat disimpulkan pengertian anggaran sebagai berikut:

1. Merupakan informasi atau pernyataan
2. Rencana atau rancangan kebijaksanaan bidang keuangan
3. Dari suatu pemerintah, organisasi atau badan usaha
4. Untuk suatu periode waktu tertentu (umumnya 1 tahun)
5. Merupakan perkiraan penerimaan dan pengeluaran daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah, menempati posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan

sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan, pendanaan, otorisasi, pengelompokan dana-massa yang akan datang, sumber penganggaran, iklim internal, standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dan berbagai unit kerja.

#### 2.4. Fungsi dan Manfaat Anggaran

Anggaran memiliki beberapa fungsi utama (Mardiasno, 2003) yaitu:

##### 1. Sebagai Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternatif sumber pendanaannya.

##### 2. Alat Pengendalian

Anggaran digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan (revenue) dan pengeluaran pemerintah sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

##### 3. Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong



memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi

#### 4. Alat Politik

Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksplisit dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.

#### 5. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Penyusunan anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkomistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat

#### 6. Alat Penilaian Kinerja

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran

#### 7. Alat Motivasi

Anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai (*challenging but attainable*) atau menuntut tetapi dapat diwujudkan (*challenging but achievable*) sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi

Anggaran menjadi penting karena beberapa alasan yaitu

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesmambutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik.

Perencanaan dan pengendalian managerial merupakan suatu proses siklus yang berlanjut dan saling berkesinambungan, sehingga salah satu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan Pendlebury (1996) membagi proses perencanaan dan pengendalian managerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap yaitu:

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar

Merupakan proses penentuan tujuan dasar dan organisasi yang tergambar dengan visi dan misi organisasi. Perencanaan ini dilakukan diluar dan perencanaan operasional. Perencanaan ini dirumuskan dan disusun oleh manajemen tingkat atas dan merupakan proses perencanaan yang rumit dan pelik karena menyangkut keberlangsungan organisasi dan terkait dengan harapan dan tujuan dasar organisasi.

2. Perencanaan operasional.

Merupakan perencanaan yang dirumuskan dan disusun untuk tercapainya tujuan dan sasaran dasar organisasi.

3. Penganggaran.

Adalah proses penyusunan anggaran untuk mendukung perencanaan operasional yang telah disusun serta untuk melaksanakan tujuan-tujuan dan target-target organisasi dalam jangka pendek (kegiatan operasional).

4. Pengendalian dan pengukuran.

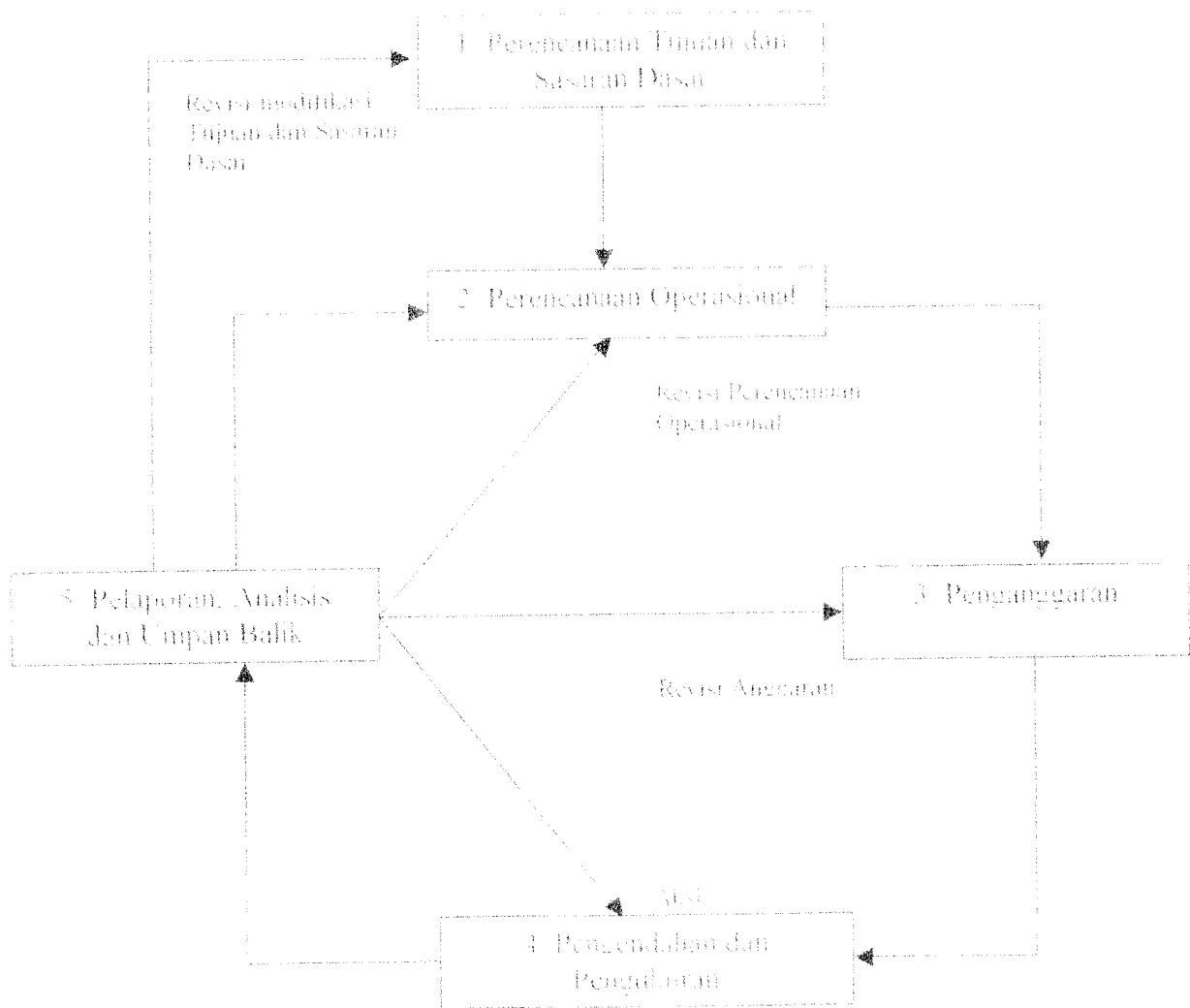
Proses pengendalian, pengawasan dan pengukuran atas anggaran yang telah disiapkan untuk dilaksanakan. Merupakan proses pelaksanaan tujuan-tujuan dan target-target jangka pendek organisasi (kegiatan operasional).

5. Pelaporan, analisis dan umpan balik.

Merupakan proses akhir dari siklus perencanaan dan pengendalian manajerial. Terdiri atas proses pelaporan hasil kegiatan operasional yang telah dicapai selama periode berlangsung, analisa atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan maupun kegiatan yang gagal dilaksanakan. Serta umpan balik untuk pelaksanaan kegiatan periode berlangsung ataupun periode berikutnya.

Siklus perencanaan dan pengendalian managerial tersebut diilustrasikan dengan gambar 2.1

Gambar 2.1 Proses perencanaan dan pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik



Sumber: *Perencanaan dan Pengendalian Manajerial*, 2010  
 Diadaptasi dari *Perencanaan dan Pengendalian Manajerial*, 2010

## 2.5. Pengertian Keuangan Daerah (APBD)

Dalam pasal 1 PP No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Revisand Baswir, 1999).

Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut diatas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana "negara" dianalogikan dengan "daerah". Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ulhasan, 1997).

## 2.6. Norma dan Prinsip - prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

### 1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab (*good governance*). Sejalan dengan *"Code of good practice on public transparency"* yang diperkenalkan oleh IMF, maka dalam proses pengembangan ekonomi publik, sebagai salah satu instrumen kontrol

pengelolaan anggaran daerah masyarakat perlu diberikan keleluasaan untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu anggaran harus mampu memberikan informasi yang lengkap akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

## 2. Disiplin Anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus berdasarkan azas efisiensi tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan dana harus didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan terutama untuk program yang diujikan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan proyek yang belum tidak tersedia kredit anggarannya serta tidak boleh melebihi kredit plafon anggaran yang telah ditetapkan.

## 3. Kendalian Anggaran

Pembayaran pemerintah dilakukan melalui mekanisme bank dan rekening yang dipakai oleh segenap masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengafektasikan penggunaannya secara adil agar dapat dimaknai oleh

seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Penetapan besarnya pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat.

#### 4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas.

#### 5. Format Anggaran

Pada dasarnya anggaran disusun berdasarkan anggaran defisit (*deficit budget formity*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus dapat membentuk dana cadangan, sedangkan apabila defisit dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.7. Pendekatan Dalam Proses Anggaran

Pendekatan dalam proses pembuangan adalah suatu cara atau metode yang ditempuh dalam menyiapkan, merumuskan, dan menyusun anggaran. Dalam pendekatan ini akan tergambar arah atau arus dari proses persiapan, perumusan dan penyusunan anggaran, akan tergambar pula mengenai asal atau sumber misal dan kearah mana insiatif tersebut dilaksanakan.

### 2.7.1. *Top Down Approach*

Adalah rencana, program maupun anggaran ditentukan sepenuhnya oleh unit kerja yang tertinggi tingkatannya, sedangkan unit-unit kerja dibawahnya hanya sekedar melaksanakan, tanpa mempertimbangkan usulan dan unit kerja dibawahnya.

Kebanyakan pendekatan ini koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja akan lebih mudah dan lebih cepat dilakukan karena disusun oleh pihak-pihak yang melakukan koordinasi dan pengawasan.

Kelengahannya adalah unit kerja yang tertinggi sering kali tidak dapat memmiskan rencana anggaran atau rencana kerja yang benar-benar memenuhi keinginan dan kebutuhan unit kerja yang lebih rendah, sehingga akan sulit untuk dilaksanakan.

### 2.7.2. *Bottom-Up Approach*

Pada pendekatan ini cara atau metode yang digunakan dalam mempersiapkan merencanakan dan merumuskan anggaran dimulainya tingkat jenjang



organisasi terbawah mengarah secara hirarki ke tingkat menengah yang lebih tinggi.

Kelebihan dan anggapan ini adalah bahwa rencana kerja yang disusun oleh unit kerja terbawah menggambarkan keinginan dan kebutuhan yang nyata (realistik).

Kelemahan dan pendekatan *bottom-up* ini adalah seringkali terjadi bahwa unit kerja terkecil terbawah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam menyusun rencana kerja sehingga mutu hasil rencana bervariasi dan kadang sulit untuk berkoordinasi sehingga waktu penyusunan menjadi lebih lama. Kelemahan lainnya dimana usulan rencana kerja dengan beban rencana yang sangat tinggi sementara dana sangat terbatas sehingga tidak dapat dibayar. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan apatisme di kalangan unit-unit yang mengusulkan.

### 2.7.3. *Mixture Approach*

Pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan *Top Down* dan Pendekatan *Bottom-Up* yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua level dalam organisasi dalam penyusunan dan perumusan yang selanjutnya. Unit kerja diatas cukup mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana dan program sesuai dengan pedoman yang telah digariskan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dari pendekatan *Top Down* ataupun *Bottom-Up* dengan harapan akan menghasilkan hasil yang paling baik.

## 2.8. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### 2.8.1. Landasan Hukum Penyusunan APBD

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Bab III tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Bagian Pertama pasal 17 ayat (1) menyebutkan "Dalam rangka menetapkan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD". Pasal 17 ayat (2) menyebutkan "Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD diawali dengan penjiwaan aspirasi masyarakat. Berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri". Pasal 18 ayat (1) menyebutkan "Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1), Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD". Pasal 19 ayat (1) menyebutkan "Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) diterapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran". Pasal 19 ayat (2) menyebutkan "Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja". Pasal 20 ayat (1) menyebutkan "Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja". Pasal 20

ayat (2) menyebutkan "Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah" Pasal 20 ayat (3) menyebutkan "Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan oleh Kepala Daerah." Pasal 20 ayat (4) menyebutkan "Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD"

#### **2.8.2. Proses Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Serang**

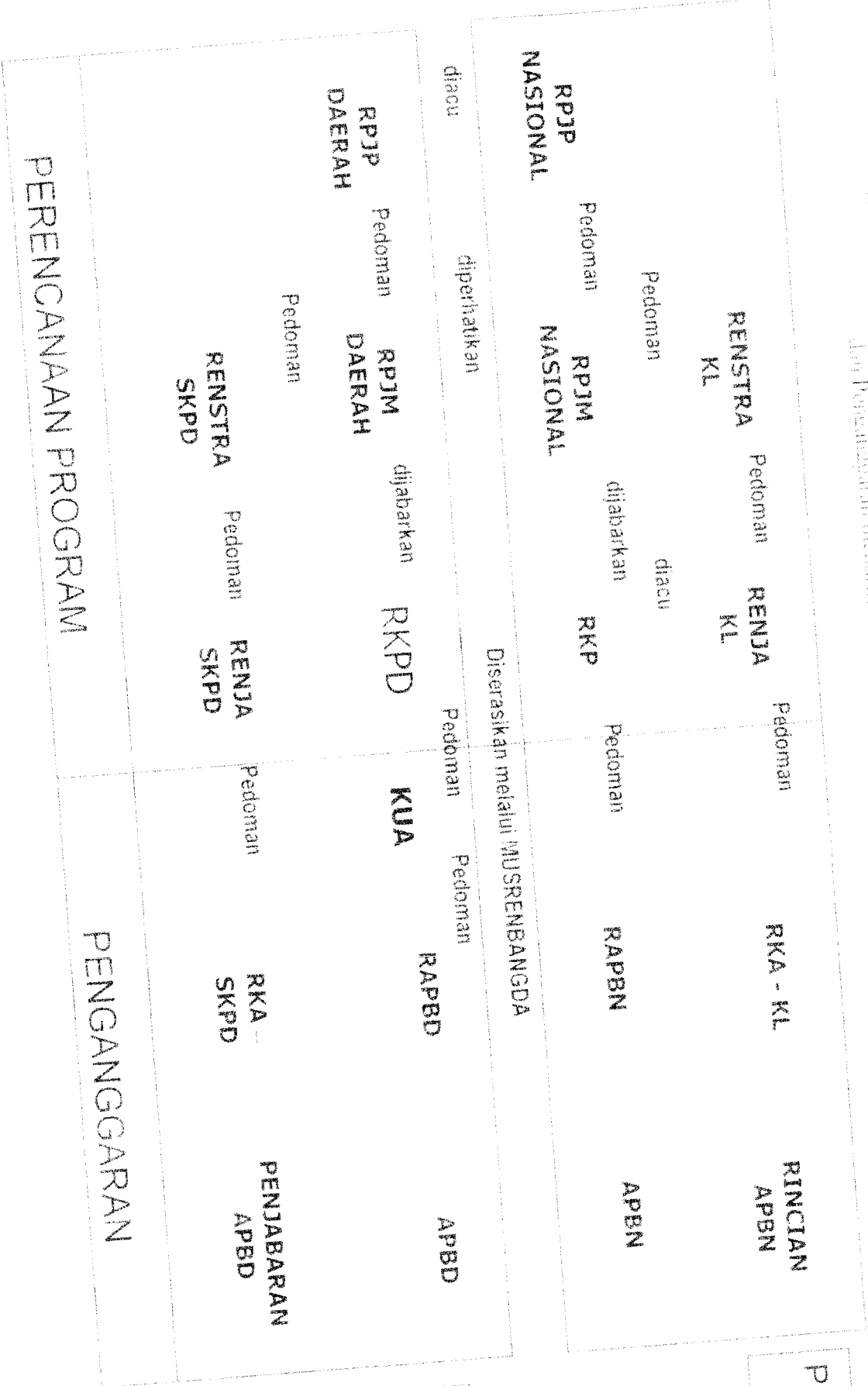
Berdasarkan instruksi Bupati Serang tentang penyusunan anggaran (2005) Anggaran tahunan dimulai dengan pengajaran aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dan upaya untuk mengatasinya. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang berupa rencana kerja pemerintah daerah kemudian DPRD bersama dengan Bupati men-sepakati Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD tahun anggaran 2006 dan menerapkan strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2006. Berdasarkan instruksi penyusunan anggaran berbasis kinerja Satuan Kerja pengguna anggaran menyusun usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan disampaikan kepada Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) dan Panitia Anggaran Legislatif (PAL).

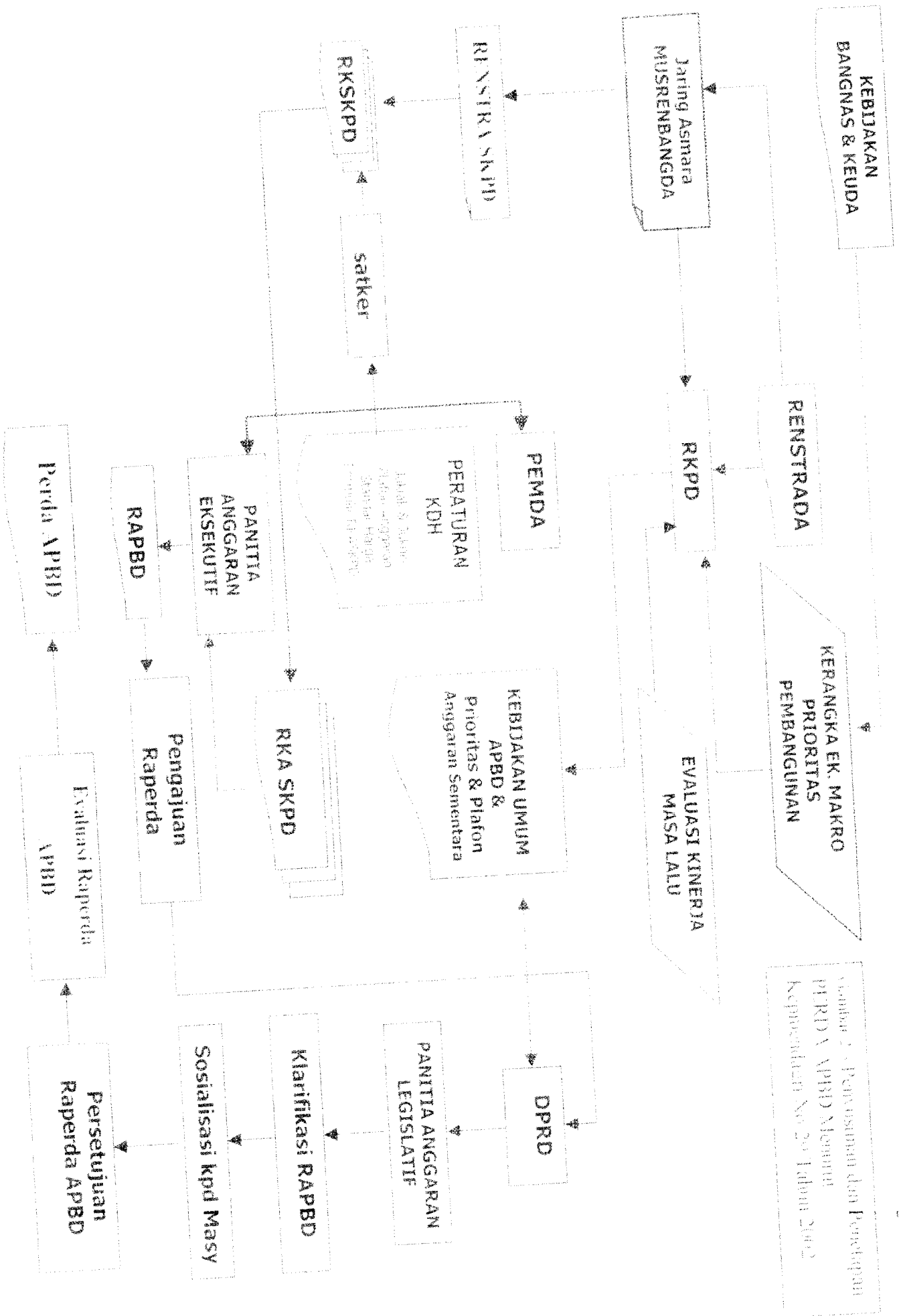
DPRD melakukan serangkaian pertemuan dengan masyarakat (*public hearing*) dan kepala satuan kerja agar pokok-pokok pikiran DPRD tahun anggaran

2000 benar-benar merefleksikan kebukaan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten melalui Panitia Anggaran Eksekutif mengklarifikasi dan menilai rencana anggaran yang diusulkan masing-masing satuan kerja apakah usulan mereka telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah digariskan. Kemudian Panitia Anggaran Eksekutif menyertakan rancangan APBD tahun 2000 untuk dipertimbangkan oleh Bupati. Selanjutnya Bupati akan menyerahkan Rancangan APBD tersebut kepada DPRD. Rancangan APBD tersebut kemudian dibahas bersama antara Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) dan Panitia Anggaran Legislatif (PAL) sambil tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Kemudian setelah selesai dibahas dan disetujui untuk menjadi Rancangan APBD Kabupaten. Sering RABPD tersebut disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi oleh Gubernur maka Bupati kemudian menetapkan RABPD tersebut menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD.

Gambar 2.2. Alur Perencanaan Program menurut UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penyelenggaraan menurut UU Keuangan Negara





Gambar 2 - Penyusunan dan Penetapan APBD Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2002

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Menurut Kerlinger, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif dan berhubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2004). Metode survei digunakan dengan maksud untuk memahami dan atau memetakan beberapa aspek perilaku dari populasi yang diamati (Sugri, 1979).

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Serang dengan mengambil objek penelitian APBD dan subjek penelitian Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Untuk dapat mencapai hasil penelitian yang dapat diyakini sebagai suatu kebenaran sangat erat berkaitan dengan metode yang digunakan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini metode yang dianggap penting adalah gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Serang, variabel penelitian, populasi, sampel, pengumpulan data dan metode analisis data dengan penjelasan sebagai berikut.

#### **3.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Serang**

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari enam kabupaten kota di Provinsi Banten, terletak di pinggir barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan

pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan jarak ± 70 km dari Kota Jakarta. Ibukota Negara Indonesia

Secara Geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat  $6^{\circ} 50'$  sampai dengan  $6^{\circ} 21'$  lintang Selatan dan  $105^{\circ} 0'$  sampai dengan  $106^{\circ} 22'$  Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 90 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 90 km.

Sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dibatasi dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur dibatasi Kabupaten Tangerang
- Sebelah Barat dibatasi oleh kota Cilegon dan Selat Sunda
- Sebelah Selatan dibatasi oleh kabupaten Lebak dan Pandeglang

Luas wilayah secara administratif tercatat 170.344,25 Ha yang terbagi atas 34 (tigapuluh) dan Wilayah Kecamatan 372 desa dan kelurahan, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1 Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Serang

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa Kelurahan
1	Anyer	Anyer	153,93	8
2	Banding	Banding	84,76	8
3	Batos	Batos	14,07	1
4	Brambang	Brambang	26,47	7
5	Banjarnegara	Banjarnegara	66,30	10
6	Canduang	Canduang	76,40	10
7	Cilande	Cilande	50,57	12
8	Cilacap	Cilacap	88,25	13
9	Cimandiri	Cimandiri	111,47	15



10	Ciomas	Sukadana	48,53	10
11	Cipocok Jaya	Cipocok Jaya	31,54	8
12	Ciris	Ciretep	34,48	14
13	Cunir	Cunir	43,60	10
14	Gumursari	Gumursari	37,20	7
15	Jawilan	Jawilan	28,05	6
16	Kesemen	Kesemen	60,30	13
17	Keban	Keban	29,60	7
18	Keruelan	Keruelan	51,50	14
19	Kramatwahi	Kramatwahi	48,50	13
20	Kopo	Kopo	44,60	10
21	Mancak	Lubran	74,03	13
22	Pabuaran	Pabuaran	127,74	13
23	Padaingene	Padaingene	99,12	13
24	Pamajayan	Pamajayan	67,10	17
25	Peti	Peti	46,94	12
26	Pomang	Pomang	64,85	18
27	Pulau Ampel	Sungayang	12,50	3
28	Serang	Kaligati	25,88	12
29	Talakan	Talakan	47,88	12
30	Tanara	Cerakcek	40,30	7
31	Tirtayasa	Tirtayasa	64,40	14
32	Tumpang Teja	Tumpang Teja	30,52	8
33	Wahatuka	Pipitan	48,48	16
34	Warung Kurung	Warung Kurung	51,20	14

); kelurahan

Dari jumlah wilayah sebanyak 34 kecamatan tersebut terdapat didalamnya 3 pulau-pulau yang berada di wilayah perairan Kabupaten Serang yang terdapat sebanyak 17 pulau diantaranya adalah Pulau Sungayang, Pulau Tunda, Pulau Pamang, Pulau Paraujan Besar, Pulau Pamujan Kecil, Pulau Yamban, Pulau Lina, Pulau Kuber dan lain-lain.

Kemilsi Fotografi Kabupaten Serang berada dalam kisaran ketinggian antara 0 sampai dengan 1778 dalam permukaan laut (dpl) dan pada umumnya tergolong pada kelas fotografi lahan dataran dan betudombana ketinggian 0 m dpl membentang dari Kecamatan Intayasa sampai Kecamatan Caringin dipantai barat selat Sunda dan ketinggian 1778 m dpl terdapat dipantai Caringin Karang yang terletak disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten pandeglang. Pada umumnya ( 97,8 %) wilayah kabupaten Serang berada pada ketinggian kurang dari 500 dpl.

Tabel 3.2. Ringkasan APBD Kabupaten Serang tahun 2014

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	Pendapatan Asli Daerah	66.787.683.167,00	67.943.698.463,96	101,73
1	Pajak Daerah	33.475.000.000,00	37.871.844.998,43	113,17
2	Retribusi Daerah	2.093.700.000,00	2.340.843.204,00	109,40
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lainnya Usaha Daerah	3.109.940.000,00	2.937.688.959,52	94,48
4	Lain-lain PAD yang Sulu	2.309.043.000,00	2.400.771.301,71	103,94
D	Dana Perimbangan	428.640.040.758,00	439.411.328.032,00	103,16
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Pajak	66.874.040.758,00	80.048.318.032,00	120,13
2	Pajak	49.940.000.000,00	54.040.000.000,00	108,40
3	Dana Alokasi Umum Subsidi	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00
4	Dana Alokasi Khusus Bantuan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan	7.400.000.000,00	7.420.000.000,00	100,00
III	Kemudahan dari Provinsi Banten	21.682.045.000,00	22.248.747.000,00	102,48
1	Lain-lain Pendapatan yang Sulu	17.818.000.000,00	17.818.000.000,00	100,00
2	Dana Penyerahang	2.864.045.000,00	4.430.747.000,00	154,65
3	Dana Fungsional Dana Uks Pegawai BERSDN	0,00	363.000,00	0,00
4	Dana Pegawai Dana UKP Dana Pengadaan CPNSD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (I + II + III)	509.105.688.925,00	529.845.580.495,96	104,16

### 3.2. Variabel Penelitian

1. Partisipasi Masyarakat
2. Transparansi Kebijakan publik

### 3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Populasi penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Propinsi Banten.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004). Sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi, maksud dari mewakili adalah sebagai cermin yang dapat dipandang menggambarkan secara maksimal keadaan populasi. Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) yang terdiri dari tujuh belas orang, enam belas orang laki-laki dan satu orang perempuan yang bersedia untuk mengisi kuisioner yang telah disediakan oleh peneliti.

Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Serang yang bertugas antara lain untuk menerima, meneliti serta membahas Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan data-data dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian menyetujui penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah

(RAPBD) dan melaporkan hasil penyesuaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Bupati

Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) terdiri atas berbagai instansi sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda)

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah (*Planning*) yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa Rencana Strategis Daerah (Renstrada), Rencana Pembangunan Tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD atau Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD, Program dan kegiatan

2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses penyesuaian anggaran (*Budgeting*) yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan

3. Sekretariat Daerah (Setda)

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan mensinergikan antara perencanaan pembangunan daerah (*Planning*) dan proses penyesuaian anggaran (*Budgeting*)

Karena hal-hal tersebut diatas serta peran dan fungsi PAE yang sangat strategis maka peneliti memutuskan PAE sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian ini

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

#### 3.4.1. Jenis Data

Data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada diperoleh dari data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau persorangan yang bisa dilakukan oleh peneliti (Utami, Husein, 2012). Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi responden (sampel) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diadopsi oleh penulis dari penelitian sejenis yang telah disampaikan didalam bab II sub judul 2<sup>a</sup> penelitian sebelumnya. Penyebaran kuesioner penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti selama 3 minggu dari tanggal 14 November sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 dengan menggunakan modus *Personal Administered Questionery* yaitu penyebaran kuesioner secara langsung dengan tatap muka sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*Response Rate*) sebesar 100%. Kuesioner yang berhasil disebar dan dikumpulkan untuk diolah dan kemudian dianalisa oleh peneliti berjumlah 10 buah.

Data-data lain yang bersifat sekunder dan terkait dengan penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang serta dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menguji apakah ada pengaruh partisipasi masyarakat dan transparasi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopanah dan Mardisamo pada tahun 2003 dengan responden anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian tersebut diatas dengan melakukan beberapa pengembangan atas objek dan subjek penelitian dan menggunakan kuesioner yang telah diadopsi untuk digunakan dalam skripsi ini.

menggunakan skala likert, akan mempunyai gradasi sangat positif sampai sangat negative yang dapat dijabarkan sebagai berikut

1) Sangat Tidak Setuju (STS)	diberi skor 1
2) Tidak Setuju (TS)	diberi skor 2
3) Ragu-Ragu (RR)	diberi skor 3
4) Setuju (S)	diberi skor 4
5) Sangat Setuju (SS)	diberi skor 5

### 3.4.2.3. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### A. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan Valid apabila jika memiliki tingkat validitas yang tinggi sebaliknya jika instrumen memiliki tingkat validitas yang rendah maka instrumen dapat dikatakan kurang valid. Pengujian validitas berguna untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun dapat mengukur dengan tepat suatu variabel yang akan diukur.

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyone, 2004). Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid.



Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antar skor masing-masing item pertanyaian dengan skor total (*item total correlation*). Perhitungan validitas dilakukan dengan rumus teknik korelasi *product moment* (Sugarmah dan Effendi, 1995). Dimana perhitungan ini dilakukan dengan jalan mengkorelasikan antar skor tiap butir (X) dengan skor total (Y) yang merupakan jumlah tiap skor butir dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Keterangan:

- $r_{xy}$  = Koefisien korelasi pearson product moment
- $N$  = Jumlah sample
- $\sum x$  = Jumlah skor total
- $\sum xy$  = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total
- $\sum x^2$  = Jumlah kuadrat skor butir
- $\sum y^2$  = Jumlah kuadrat skor total

Untuk melihat tingkat signifikansi dari item-item yang di uji, nilai korelasi *product moment* ( $r$ ) hitung  $t$  dibandingkan dengan  $r$  tabel atau dengan membandingkan dengan nilai ketetapan yang telah disepakati yaitu 0,3 (Sugiono, 2000). Jika nilai  $t$  hitung lebih besar dari 0,3 atau  $r$  tabel maka item dianggap valid.

Uji Validitasi kuesioner ini menggunakan program SPSS 11.00 dengan cara melihat tingkat signifikansi, dengan melihat nilai *Sig.* korelasi item dianggap valid jika probabilitas atau *Sig.* lebih kecil dari  $\alpha$  yang ditentukan yaitu 0,05.

Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Soal	Standar Koefisien	Koefisien Signifikansi	Kesimpulan
1	0,05	0,000	Valid
2	0,05	0,000	Valid
3	0,05	0,000	Valid
4	0,05	0,000	Valid
5	0,05	0,000	Valid
6	0,05	0,000	Valid
7	0,05	0,000	Valid

Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Soal	Standar Koefisien	Koefisien Signifikansi	Kesimpulan
1	0,05	0,000	Valid
2	0,05	0,000	Valid
3	0,05	0,000	Valid
4	0,05	0,000	Valid
5	0,05	0,000	Valid

### B. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sebuah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan (Sugartimbu dan Effendi, 1995)

Uji reliabilitas merupakan suatu cara untuk melihat apakah alat ukur (berupa instrumen) yang digunakan konsisten atau tidak. Apabila suatu alat pengukur dipakai dua kali atau lebih dan hasil pengukurannya yang diperoleh konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel.

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus alpha (Suganibun dan Effendi 1995), rumus alpha digunakan untuk instrumen yang skalanya bukan 1 dan 0.

$$r_a = \frac{K}{(K-1)} \left( \frac{\sum d_i^2}{n^2} \right)$$

Keterangan:

$r_a$  = reliabilitas instrument

$K$  = banyaknya butir pertanyaan atau butir soal

$\sum d_i^2$  = Jumlah varian butir

$n^2$  = varians total

Konsistensi jawaban ditunjukkan oleh tinggi atau rendahnya koefisien *Cronbach's alpha* yang dihasilkan dari proses pengujian. Nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,5 menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel/konsisten.

Uji Reliabilitas kuesioner ini menggunakan program SPSS 11.00 dengan cara melihat nilai *Cronbach's alpha*, item dianggap reliabel jika Nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,5 (Nunnally, 1997).

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Soal	Standar Koefisien	Koefisien Alpha	Kesimpulan
1	0,5	0,9096	Reliabel
2	0,5	0,9096	Reliabel
3	0,5	0,9096	Reliabel
4	0,5	0,9096	Reliabel
5	0,5	0,9096	Reliabel
6	0,5	0,9096	Reliabel
7	0,5	0,9096	Reliabel

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik

No	Standar Koefisien	Koefisien Alpha	Kesimpulan
1	0,5	0,8860	Reliabel
2	0,5	0,8860	Reliabel
3	0,5	0,8860	Reliabel
4	0,5	0,8860	Reliabel
5	0,5	0,8860	Reliabel

### 3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2014) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia (objek), kondisi sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimana selarang. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pihak yang diamati yang tentu saja berasal dari kuesioner yang disebarluaskan. Analisis data yang dilakukan adalah mengumpulkan kuesioner untuk mengambil penilaian dan generalisasi dari jawaban-jawaban yang telah diberikan.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dengan membuat interval antara 1 sampai dengan 5, dan menggunakan rata-rata skor total jawaban perspsi responden, secara umum dapat diartikan dengan melihat letak rata-rata skor jawaban dalam interval kelas yang ditentukan:

$$100 \cdot P_n = \frac{5 - 1}{5} \cdot 100$$

Dari informasi tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden sebagai berikut:

1. Nilai jawaban 1,00 – 1,70 = penilaian sangat rendah/sangat tidak setuju
2. Nilai jawaban 1,80 – 2,50 = penilaian rendah/tidak setuju
3. Nilai jawaban 2,60 – 3,30 = penilaian ragu-ragu
4. Nilai jawaban 3,40 – 4,10 = penilaian tinggi/setuju
5. Nilai jawaban 4,20 – 5,00 = penilaian sangat tinggi/sangat setuju

### 4.1. Analisis Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden

#### 4.1.1. Analisis Variabel Partisipasi Masyarakat

1. Apakah saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD?

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	1 Orang	5,3%
Yang menjawab Setuju (S)	3 Orang	14,3%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	12,5%

Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	10 Orang	100%

#### Skor Total – Rata-Rata – Kriteria

71 – 4,05 – Sangat Setuju

sumbu: Data diperoleh melalui wawancara

#### Interpretasi:

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 90% menyatakan sangat setuju dan sebanyak 1 orang atau sebesar 10% menyatakan setuju hal ini berarti Pemiluk Serang sudah benar-benar melibatkan masyarakat dalam perencanaan, dan melibatkan umum (MPO) melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di berbagai tingkat mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten

2. Kritik dan saran masyarakat membuat saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	3 Orang	38,8%
Yang menjawab Setuju (S)	11 Orang	88,8%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	15,7%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	10 Orang	100%

#### Skor Total – Rata-Rata – Kriteria

75 – 4,05 – Sangat setuju

sumbu: Data diperoleh melalui wawancara

### Interpretasi :

Responden sebanyak sebelas orang atau sebesar 45,8% persen menyatakan setuju dan sebanyak tiga orang atau sebesar 11,8% menyatakan sangat setuju. Hal ini mengindikasikan Pemkab Serang menganggap penting adanya kerkel dan sarim yang disampaikan oleh masyarakat melalui proses musrenbang dalam menentukan strategi dan prioritas APBD.

### 3. Bagaimana partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka penyusunan APBD?

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	4 Orang	15,4%
Yang menjawab Setuju (S)	10 Orang	38,5%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	7,7%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	3 Orang	11,1%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	19 Orang	100%

### Skor Total : Rata-Rata : Kriteria

1000 : 4125 : Setuju

Sumber : Data primer yang diolah 2018

### Interpretasi :

Responden sebanyak sepuluh orang atau sebesar 52,6% menyatakan setuju dan sebanyak empat orang atau sebesar 21,1% menyatakan sangat setuju. Hal tersebut mengindikasikan Pemkab Serang menganggap penting peran partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan APBD. Musrenbang adalah salah satu sarana untuk memfasilitasi partisipasi tersebut.

4. Masyarakat selanjutnya berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	3 Orang	18,8%
Yang menjawab Setuju (S)	10 Orang	62,5%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	12,5%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	1 Orang	6,3%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Jumlah	16 Orang	100%

#### Skor Total Rata-Rata Kriteria 4

$$= \frac{63}{100} = 0,63 = 63\% \text{ Setuju}$$

Sumber: Data primer yang dikolah 2016

#### Interpretasi:

Responden sebanyak sepuluh orang atau sebesar 62,5% menyatakan setuju dan sebanyak tiga orang atau sebesar 18,8% menyatakan sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemkab Serang terbuka dalam menanggapi dan menanganai advokasi masyarakat pembid anggaran Pemkab Serang pun senantiasa terbuka dalam menghadapi proses publikasi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

5. Saya kira antara dewan masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atau merencanakan APBD

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	8 Orang	50,0%
Yang menjawab Setuju (S)	7 Orang	43,8%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	1 Orang	6,3%



Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	1 Orang	6,3%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	16 Orang	100%

**Skor Total : Rata-Rata : Kriteria**

3,64 : 4 : Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

**Interpretasi :**

Responden sebanyak tujuh orang atau sebesar 43,8% menyatakan setuju dan sebanyak lima orang atau sebesar 31,3% menyatakan sangat setuju hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Serang senantiasa melakukan konsultasi dengan DPRD dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan RABPD.

- 4) Saran dan kritik dari masyarakat saya kira diperlukan pertimbangan untuk merevisi anggaran

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	4 Orang	25%
Yang menjawab Setuju (S)	10 Orang	62,5%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	2 Orang	12,5%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	16 Orang	100%

**Skor Total : Rata-Rata : Kriteria**

4,125 : 4 : Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

**Interpretasi :**

Responden sebanyak sepuluh orang atau sebesar 62,5 % menyatakan setuju dan sebanyak empat orang atau sebesar 25 % menyatakan sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa Pemkab Serang menganggap penting saran dan kritik dan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan mereka mengenai

7. Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	3 Orang	48,8%
Yang menjawab Setuju (S)	9 Orang	56,3%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	3 Orang	48,8%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	1 Orang	15,4%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	16 Orang	100%

**Skor Total = Rata-Rata = Kriteria**

$$\frac{62}{16} = 3,875 \quad \text{Setuju}$$

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

**Interpretasi :**

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 56,3 % menyatakan setuju dan sebanyak tiga orang atau sebesar 48,8 % menyatakan sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan APBD di sosialisasikan secara baik oleh Dewan dan Pemkab Serang

#### 4.1.2. Analisa Variabel Transparansi Kebijakan Publik

1. Menurut saya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	6 Orang	37,5%
Yang menjawab Setuju (S)	9 Orang	56,3%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	1 Orang	6,3%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	16 Orang	100%

**Skor Total : Rata-Rata = Kriteria**

70 = 4,313 Sangat setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2006

#### Interpretasi :

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 56,3% menyatakan setuju dan sebanyak enam orang atau sebesar 37,5% menyatakan sangat setuju hal tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Serang sangat memahami bahwa pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi didalam penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasaan APBD

2. Selama ini menurut saya masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	1 Orang	6,3%
Yang menjawab Setuju (S)	11 Orang	68,8%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	1 Orang	6,3%

Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	3 Orang	18,8%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	16 Orang	100%

**Skor Total , Rata-Rata , Kriteria**

38                      3,625                      Setuju

sumber : Data primer yang diolah, 2019

**Interpretasi :**

Responden sebanyak sebelas orang atau sebesar 68,8% menyatakan setuju hal tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Serang telah memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk dapat berhubungan dengan dokumen-dokumen publik yang terkait dengan APBD.

3. Harapan pemerintah menjawab tuntutan pengetahuan saya selama ini tepat waktu

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	6 Orang	37,5%
Yang menjawab Setuju (S)	9 Orang	56,3%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	1 Orang	6,3%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	16 Orang	100%

**Skor Total , Rata-Rata , Kriteria**

60                      4,313                      Sangat Setuju

sumber : Data primer yang diolah, 2019

### Interpretasi:

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 50,0% menyatakan setuju dan sebanyak enam orang atau sebesar 33,3% menyatakan sangat setuju hal tersebut menjadikan bahwa Pemilik Sekolah telah mampu menyusun dan membuat laporan pertanggung jawaban tahunan APBD Kabupaten tepat waktu untuk disampaikan kepada pihak terkait (DPBD).

4. Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara-suara rakyat

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	5 Orang	31,3%
Yang menjawab Setuju (S)	10 Orang	62,5%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	1 Orang	6,3%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	16 Orang	100%

### Skor Total, Rata-Rata, Kriteria

68 / 16 = 4,25 Sangat Setuju

Sumber: Data primer yang dikaji, 2016

### Interpretasi:

Responden sebanyak sembilan orang atau sebesar 56,3% menyatakan setuju dan sebanyak lima orang atau sebesar 31,3% menyatakan sangat setuju hal tersebut berarti Pemilik Sekolah sangat memahami betapa pentingnya kebijakan transparansi anggaran untuk dapat mengakomodasi suara-suara partisipasi masyarakat didalam penyusunan APBD.

5. Adanya sistem pemberian informasi kepada publik yang saya dapat meningkatkan kelengkapan transparansi anggaran

Yang menjawab Sangat Setuju (SS)	1 Orang	12,5%
Yang menjawab Setuju (S)	11 Orang	77,9%
Yang menjawab Ragu-Ragu (RR)	1 Orang	6,3%
Yang menjawab Tidak Setuju (TS)	0 Orang	0%
Yang menjawab Sangat Tidak Setuju (STS)	0 Orang	0%
Total	13 Orang	100%

**Skor Total** : Rata-Rata = **Kriteria**

$\frac{11 \times 4}{13} = 3,425$  = **Setuju**

sukses (Ghozali, yang diolah, 2009)

#### **Interpretasi :**

Responden sebanyak dua belas orang atau sebesar 77,9% menyatakan setuju hal ini menggambarkan Pemkab Serang memiliki dan menganggap penting adanya sistem informasi yang dapat meningkatkan transparansi didalam anggaran

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pembahasan Variabel Partisipasi Masyarakat

Dari seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tanggapan para pemirsa dapat digambarkan secara keseluruhan bahwa masyarakat kabupaten Serang relatif benar-benar dilibatkan didalam proses penyusunan awal kelahirannya APBD penyusunan rancangan APBD maupun didalam proses kerja APBD. Melalui wakil-wakil rakyat di DPRD aspirasi masyarakat disampaikan kepada Pemerintah kabupaten Serang. Didalam masa proses anggota dewan melakukan proses *beranggot* dengan masyarakat secara langsung yang disebut dengan Jaring Asosiasi (Pengorganisasian Aspirasi Masyarakat) biasanya kemudian dimusyawahi dan disebut dengan Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang dimusyawahi sebagai salah satu acuan didalam proses penyusunan rancangan APBD. Pemerintah daerah pun memiliki Kotak Pos Pengaduan Masyarakat yang dibangun oleh bagian Humas Pemkab Serang yang menerima pengaduan, keluhan ataupun usulan dalam bentuk surat tertulis secara langsung dari masyarakat. Masyarakat pun dapat secara langsung menyampaikan aspirasi kepada Bupati Kabupaten Serang didalam kegiatan kunjungan rumah yang berlangsung tiap satu minggu sekali. Bupati Serang juga membuka pengaduan, keluhan ataupun usulan melalui Layanan Pesan Singkat SMS (*Short Message Service*). Kemudian masyarakat pun dapat melakukan *mark* atau demonstrasi sebagai salah satu cara dalam menyampaikan aspirasi.

Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Serang benar-benar menganggap penting adanya peran serta partisipasi masyarakat. Salah satu indikator lainnya

adalah penyelenggaraan urusan-urah rencana pembangunan (musembang) dan berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten yang menghidang berbagai macam elemen-elemen masyarakat dan lapisan masyarakat serta berbagai macam lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada.

#### 4.2.2. Pembahasan Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Dari seluruh riwayat yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap poin pertanyaan dapat digambarkan secara keseluruhan bahwa Pemkab Serang sangat memahami serta menganggap penting adanya transparansi kebijakan publik didalam penyusunan rancangan APBD dan berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan baik, antara lain dengan cara memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang. Sebagai bukti adalah dapat diaksesnya dokumen-dokumen yang terkait dengan anggaran oleh masyarakat luas. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serang ataupun melalui Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Serang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Serang pun telah memiliki situs *web site* sebagai salah satu cara untuk sosialisasi kegiatan maupun program kerja pemerintah kabupaten Serang.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang disusun dan dirumuskan peneliti merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?
2. Bagaimanakah Persepsi Pemerintah Kabupaten Daerah Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ?

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka peneliti dapat menyusun dan merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah **Baik**

Kesimpulan tersebut di dapatkan dari analisis atas seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap poin pertanyaan kuisioner. Bahwa masyarakat Kabupaten Serang telah benar-benar dilibatkan didalam proses penyusunan arali

kebijakan umum APBD, penyusunan rancangan APBD maupun didalam proses revisi APBD melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang. Salah satunya adalah musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan berbagai kegiatan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

## 2. Persepsi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah **Baik**.

Kesimpulan tersebut di dapatkan dari analisis atas seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap poin pertanyaan kuesioner. Pemkab Serang sangat memahami serta menganggap penting adanya transparansi kebijakan publik didalam penyusunan APBD dan berusaha untuk dapat mewujudkannya dengan baik dengan cara memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang.

### 3.2. Saran

Saran yang disusun oleh penulis merupakan pendapat penulis yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini demi mewujudkan keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pendapat ini dihasilkan selama melakukan kegiatan penelitian di Pemerintah Kabupaten Serang serta hasil analisis data dan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah disusun dan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini.

### 5.2.1. Saran Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Menurut Marliasno (2003), Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Kriteria-kriteria tersebut menurut persepsi Pemkab Serang telah dapat diemdu dengan baik.

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang telah ada senantiasa dipertahankan dan senantiasa dipayal an untuk terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan peraturan-peraturan daerah serta pemberian fasilitas-fasilitas pendukung bagi masyarakat Kabupaten Serang.
2. Tingkat transparansi kebijakan publik yang sudah ada senantiasa dikembangkan menuju kearah yang lebih baik dan lebih transparan. Karena transparansi merupakan salah satu semangat dan *Good Governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (editor), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (edisi I), UPP AMIP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- , *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi Dan pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMIP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Eddy Wibowo, Lomo HS, dan Hesel Nogi S., *Tangkalisan: Memahami Good Governance dan Good Corporate Governance*, YPPAI, Yogyakarta, 2004.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jakarta, 2002.
- Lones Rowan and Maurice Poddlebury, *Public Sector Accounting*, 5<sup>th</sup> edition, Pitman Publishing, London, 2000.
- Mardiasno, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- , *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- , *IMPLEMENTASI TEKNOLOGI KEUANGAN DAERAH: Implementasi Value for Money Aspek Sebagai Analisis Teknologi Keuangan Akuntabilitas publik*, JAJI, 2000, 63-82.
- , *Seperti, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 2003, 1160-1173.
- Pemerintah Kabupaten Serang, *Asistensi Penyusunan anggaran berbasis kinerja tahun anggaran 2006*, Pemkab Serang, Serang, 2007.
- Revisowid Rossari, *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Tiga BPEF, Yogyakarta, 1999.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2001.
- , *Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2001.

# L A M P I R A N

Lampiran 1

Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Correlations

		Transparansi	Kepercayaan	Partisipasi	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
K1.1	Kepercayaan	0.66	0.70	0.61	0.70	0.77	0.21
	Partisipasi	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	N	10	10	10	10	10	10
K1.2	Kepercayaan	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	Partisipasi	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	N	10	10	10	10	10	10
K1.3	Kepercayaan	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	Partisipasi	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	N	10	10	10	10	10	10
K1.4	Kepercayaan	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	Partisipasi	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	N	10	10	10	10	10	10
K1.5	Kepercayaan	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	Partisipasi	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	N	10	10	10	10	10	10
SMA1	Kepercayaan	0.21	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	Partisipasi	0.61	0.67	0.61	0.67	0.77	0.67
	N	10	10	10	10	10	10

\* Correlation is significant at the 0.05 level.

\* Correlation is significant at the 0.01 level.

Lampiran 2

Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Kepercayaan (K1.1) =  $0.66 \times 10 = 6.6 > 2$  reliabel

Kepercayaan (K1.2) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Kepercayaan (K1.3) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Kepercayaan (K1.4) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Kepercayaan (K1.5) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Partisipasi (K1.1) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Partisipasi (K1.2) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Partisipasi (K1.3) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Partisipasi (K1.4) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Partisipasi (K1.5) =  $0.61 \times 10 = 6.1 > 2$  reliabel

Kelembagaan (SMA1) =  $0.21 \times 10 = 2.1 < 2$  tidak reliabel

Kelembagaan (K1.1) =  $0.70 \times 10 = 7 > 2$  reliabel

Kelembagaan (K1.2) =  $0.67 \times 10 = 6.7 > 2$  reliabel

Kelembagaan (K1.3) =  $0.67 \times 10 = 6.7 > 2$  reliabel

Kelembagaan (K1.4) =  $0.67 \times 10 = 6.7 > 2$  reliabel

Kelembagaan (K1.5) =  $0.67 \times 10 = 6.7 > 2$  reliabel

## Lampiran 3

## Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Berkelompok

		Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8
P1.1	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.2	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.3	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.4	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.5	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.6	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.7	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.8	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.9	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.10	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.11	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.12	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.13	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.14	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.15	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.16	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.17	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.18	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.19	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.20	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.21	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.22	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.23	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.24	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.25	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.26	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.27	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.28	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.29	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1.30	Partisipasi dalam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	kegiatan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

100% = seluruh responden menjawab benar.

0% = tidak ada yang menjawab benar.

## Lampiran 4

## Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien Cronbach's Alpha

$$R = \frac{\sum R_{ij}^2 - \frac{(\sum R_i)^2}{N} - \frac{(\sum C_j)^2}{N}}{N - 1} \quad (1)$$

di mana: R = koefisien reliabilitas;  $\sum R_{ij}^2$  = jumlah kuadrat skor jawaban responden;  $\sum R_i$  = jumlah skor jawaban responden; N = jumlah responden;  $\sum C_j$  = jumlah kuadrat skor jawaban pertanyaan.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien Cronbach's Alpha

$$R = \frac{\sum R_{ij}^2 - \frac{(\sum R_i)^2}{N} - \frac{(\sum C_j)^2}{N}}{N - 1} \quad (1)$$

Lampiran 5

## Frequency Table Partisipasi Masyarakat

PM\_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rangat Ragu	2	12,5	12,5	12,5
	Sedang	7	43,8	43,8	56,3
	Sangat Sedang	5	31,3	31,3	87,5
	Total	14	100,0	100,0	

PM\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rangat Ragu	2	12,5	12,5	12,5
	Sedang	11	68,8	68,8	81,3
	Sangat Sedang	5	31,3	31,3	100,0
	Total	18	100,0	100,0	

PM\_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rangat Ragu	2	12,5	12,5	12,5
	Sedang	10	62,5	62,5	75,0
	Sangat Sedang	4	25,0	25,0	100,0
	Total	16	100,0	100,0	

PM\_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sedang	1	6,3	6,3	6,3
	Rangat Ragu	2	12,5	12,5	18,8
	Sedang	10	62,5	62,5	81,3
	Sangat Sedang	5	31,3	31,3	100,0
	Total	16	100,0	100,0	

PM\_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sedang	1	6,3	6,3	6,3
	Rangat Ragu	5	31,3	31,3	37,5
	Sedang	10	62,5	62,5	68,8
	Sangat Sedang	4	25,0	25,0	100,0
Total	16	100,0	100,0		



PA1\_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Benar-benar	4	100%	100%	100%
	Setuju	0	0%	0%	0%
	Sangat Setuju	0	0%	0%	0%
	Total	4	100%	100%	

PA1\_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Total Setuju	4	100%	100%	100%
	Ragu-ragu	0	0%	0%	0%
	Setuju	0	0%	0%	0%
	Sangat Setuju	0	0%	0%	0%
	Total	4	100%	100%	

Lampiran 6

Frequency Table Transparansi Kebijakan Publik

KP\_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	1	25%	25%	25%
	Setuju	3	75%	75%	100%
	Sangat Setuju	0	0%	0%	0%
	Total	4	100%	100%	

KP\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Total Setuju	3	75%	75%	75%
	Ragu-ragu	1	25%	25%	100%
	Setuju	0	0%	0%	0%
	Sangat Setuju	0	0%	0%	0%
	Total	4	100%	100%	

KP.3

		Empirex	Person	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Blank (0.00)	1	100	100.0	100.0
	Setup	1	100	100.0	100.0
	Setup & Setup	1	100	100.0	100.0
	Total	1	100	100.0	100.0

KP.4

		Empirex	Person	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Blank (0.00)	1	100	100.0	100.0
	Setup	19	129	92.3	98.8
	Setup & Setup	5	31	21.4	100.0
	Total	25	160	100.0	100.0

KP.5

		Empirex	Person	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Blank (0.00)	1	100	100.0	100.0
	Setup	17	110	77.0	84.3
	Setup & Setup	1	68	48.6	100.0
	Total	19	118	100.0	100.0

## Lampiran 7

## Frequency Table

## Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Contributed Percent
Valid	Laki-laki	12	38,7%	38,7%	38,7%
	Peserta Wanita	11	34,4%	34,4%	34,4%
	Total	23	73,1%	73,1%	73,1%

## Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Contributed Percent
Valid	17-18 tahun	1	4,3%	4,3%	4,3%
	19-20 tahun	1	4,3%	4,3%	4,3%
	21-25 tahun	19	81,4%	81,4%	81,4%
	26-35 tahun	1	4,3%	4,3%	4,3%
Total	23	100,0%	100,0%	100,0%	

## Laboran Partisan Anggosa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Contributed Percent
Valid	Anggosa	12	38,7%	38,7%	38,7%
	Selamatkan	11	34,4%	34,4%	34,4%
	Keputusan	1	4,3%	4,3%	4,3%
Total	23	100,0%	100,0%	100,0%	



Lampiran 9  
Kuesioner Partisipasi Masyarakat

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Menurut saya masyarakat dibibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD	SS	S	RR	TS	STS
2	Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan promosi APBD	SS	S	RR	TS	STS
3	Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD	SS	S	RR	TS	STS
4	Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran	SS	S	RR	TS	STS
5	Saya kira antara dewan masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD	SS	S	RR	TS	STS
6	Saran dan kritik dari masyarakat saya kira dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran	SS	S	RR	TS	STS
7	Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi	SS	S	RR	TS	STS

Keterangan

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RR = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak setuju

Lampiran 10  
Kuesioner Transparansi Kebijakan Publik

No.	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi	SS	S	RR	TS	STS
2	Selama ini menurut saya masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran	SS	S	RR	TS	STS
3	Laporan pertanggung jawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu	SS	S	RR	TS	STS
4	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara usulan rakyat	SS	S	RR	TS	STS
5	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	SS	S	RR	TS	STS

Keterangan

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RR = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak setuju